

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kejadian pada awal tahun 2020 sempat mengguncangkan dunia, khususnya di wilayah Asia yaitu adanya temuan virus. Virus ini dikenal dengan nama *Coronavirus Disease 2019* atau sering disebut Covid-19 yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)* (Susilo et al., 2020). Pertama kali virus ini ditemukan di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China pada Desember 2019 (Supriatna, 2020). Hal ini memberikan dampak begitu besar terhadap banyak negara dipenjuru dunia, baik secara positif maupun negatif. Penularan Covid-19 terbilang cukup cepat sehingga banyak warga negara yang teridentifikasi terpapar virus ini. Termasuk di Indonesia masuk Kawasan Asia yang memiliki tingkat resiko penyebaran Covid-19 cukup tinggi.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 bahwa kasus pertama (dan kedua) yang sudah teridentifikasi positif Covid-19 (Almuttaqi, 2020). Adanya kasus Covid-19 yang sudah masuk di Indonesia membuat pemerintah dengan sigap membuat peraturan terkait pencegahan penyebaran virus ini. Hal ini kemudian dibuktikan dengan beberapa pembuatan aturan terkait pencegahan penyebaran serta penanganan Covid-19. Adapun beberapa peraturan yang sudah diterapkan dimasyarakat dan memiliki pro kontra sehingga perlunya ada penyempurnaan aturan.

Pembuatan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Kemudian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali yang mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 yang memberikan instruksi pada setiap wilayah untuk menerapkan kebijakan sesuai kondisi wilayah dengan beberapa tingkatan level, mulai dari level 1 hingga 4. Pada saat ini muncul kebijakan baru yaitu adanya PPKM Mikro yang mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 mengatur tentang wewenang Daerah khususnya Desa untuk mengoptimalkan penanganan Covid-19.

Pada penelitian ini berfokus pada kebijakan PPKM Mikro bagaimana pelaksanaan tersebut banyak menemui pro dan kontra dalam penerapannya. Berangkat dari Instruksi Mendagri Nomor 13 Tahun 2021, Pemerintah Daerah hingga Desa segera melaksanakan dan menerapkan peraturan tersebut. Dalam penerapan PPKM Mikro ini berdasarkan peraturan yang berlaku dimulai dari Desa dan Kelurahan kemudian dapat diturunkan hingga tingkatan RT. Selain itu juga melihat wilayah tersebut dengan kriteria beberapa zona diantaranya, hijau, kuning, oranye dan merah.

Perlu dipahami dalam penerapan PPKM Mikro ini diterapkan sesuai wilayah yang dibagi dengan beberapa zona sesuai warna dijelaskan pada Mendagri Nomor 13 Tahun 2021. Warna hijau, tidak ada temuan kasus Covid-19 di wilayah tingkatan satu RT. Warna Kuning, terdapat satu sampai dua kasus rumah terkonfirmasi positif dalam satu RT dalam kurun waktu tujuh hari. Warna oranye, terdapat tiga sampai lima kasus terkonfirmasi positif disatu wilayah RT selama

tujuh hari. Zona merah, terdapat lima kasus atau lebih terkonfirmasi positif selama tujuh hari. Tentu saja dalam penerapannya melibatkan *stake holder* yang ada di wilayah tersebut guna memudahkan dalam berkoordinasi.

Selain itu di beberapa wilayah yang terdapat zona dengan kasus terkonfirmasi positif cukup banyak membuat wilayah tersebut dibatasi dan berdampak di wilayah sekitarnya. Berdasarkan data Desa Sriharjo per tanggal 25 Mei 2021 total terkonfirmasi terdiri dari; dirawat/isolasi sebanyak 12 orang, sembuh 102 orang, dan yang meninggal 4 orang (Heri purwantara, sriharjo.bantulkab.go.id, 2021). Meskipun per tanggal 25 Mei 2021 disebutkan masih termasuk zona hijau, wilayah Kabupaten Bantul Masih terdapat beberapa sebaran Covid-19 cukup tinggi dengan adanya beberapa zona merah. Berdasarkan data Dinkes Kabupaten Bantul sebaran Covid-19 per tanggal 25 Mei 2021 tercatat terkonfirmasi positif berjumlah 55 orang, sembuh 61 orang, meninggal 2 orang, suspek bertambah 80 orang, dan probable 8 orang (dinkes.bantulkab.go.id, 2021).

Walaupun wilayah Desa Sriharjo termasuk wilayah zona hijau, akan tetapi wilayah disekitarnya masih cukup tinggi persebaran kasus Covid-19 ini. Hal yang menjadi kekhawatiran yaitu masyarakat yang masih mengabaikan protokol Kesehatan dan kurang tegasnya sanksi yang berlaku. Maka perlu adanya upaya untuk mencegah dan memutus penyebaran Covid-19. Untuk melakukan upaya tersebut maka perlu adanya 5M yaitu (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas) (Irwan et al., 2021). Hal ini bertujuan demi terlaksananya aturan tersebut agar lebih efektif dan efisien.

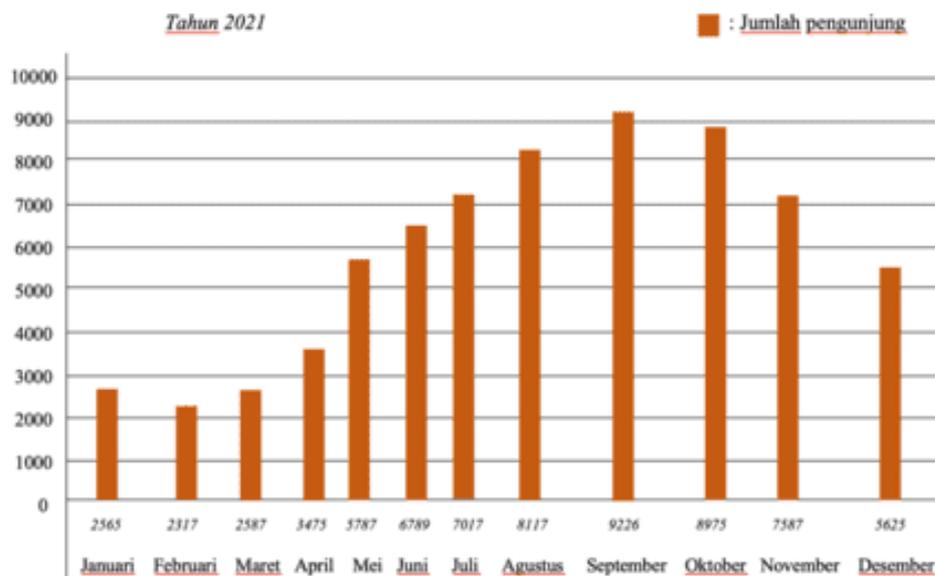
Dengan adanya PPKM Mikro ini membuat beberapa aktivitas menjadi terbatas sehingga masyarakat merasakan begitu banyak dampaknya. Beberapa sektor di wilayah Kepanewon Imogiri khususnya Desa Sriharjo mengalami dampak yaitu sektor pariwisata dan ekonomi. Menurut Kepala Desa Sriharjo, Titik Iswayatun mengatakan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) selama ini kan mereka mengeluh lesu, pasarnya sepi. Saya awalnya ini meminta diskusi dengan beberapa teman, kira-kira apa yang bisa kita lakukan (Wijana, E.&Maulina,M, suarajogja.id, 2020). Hal ini menjadikan fokus utama selain pariwisata yang pengunjung tak seramai dulu sebelum pandemi. Di sekitaran wisata Desa Sriharjo juga terdapat beberapa usaha kecil dari warga setempat.

Usaha tersebut berupa makanan ataupun minuman khas daerah, makanan ringan. Dengan adanya PPKM Mikro ini membuat masyarakat kebingungan, karena pengunjung wisata juga tidak seramai dulu dan melihat peraturan pemerintah yang diterapkan begitu ketat. Penyebaran Covid-19 yang masih relatif tinggi juga menjadikan wisatawan dan warga sekitar khawatir walaupun sudah adanya penerapan 5M. Tentu saja Pemda dan Pemdes serta masyarakat harus bersinergi dalam mencegah penyebaran Covid-19 dan membuat sektor pariwisata juga ekonomi berjalan normal seperti dahulu.

Adapun beberapa potensi yang terdapat di wisata Desa Sriharjo diantaranya, terasiring bertuliskan Sriharjo beradad di Srikemninut, Sungai Oyo, Techno Ecopark dan air terjun (lppm.uin-suka.ac.id, 2021). Wisata tersebut awalnya cukup biasa namun oleh warga setempat dan pemuda disana diolah secara

mandiri menjadi objek wisata yang menarik dengan pemandangan cukup indah. Seiring berjalannya waktu sektor wisata perlahan pulih namun belum sepenuhnya,

Dapat dilihat dengan saksama bagaimana data jumlah pengunjung wisata Srikeminut di desa Sriharjo selama tahun 2021 yang diperoleh dari pengelola wisata sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Data Diagram Pengunjung Wisata Srikeminut Desa Sriharjo Selama Tahun 2021

Jika dilihat dari grafik tersebut, angka pengunjung wisata di Sriharjo cukup banyak dan justru terjadi lonjakan kenaikan. Maka pengelola wisata disana bersama pemangku kepentingan bekerjasama untuk menerapkan protokol kesehatan, agar pengunjung yang datang tetap diawasi dan dibatasi. Untuk memasuki kawasan wisata tersebut tidaklah terlalu merogoh kantong terlalu dalam, cukup membayar retribusi parkir motor sejumlah Rp.2000 dan kendaraan roda empat Rp.5000 saja. Perlu juga penataan wisata agar rapi dan tidak saling menyaingi dengan yang lainnya walaupun desa wisata tersebut dikelola secara mandiri. Dilain sisi perlu

adanya antisipasi terhadap kondisi ekologi Desa Sriharjo mengingat sekeliling wisata tersebut terdapat tebing tinggi dan sungai rawan banjir. Banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pengelola wisata disana, idealnya mengajak pemangku kepentingan untuk duduk bersama untuk memajukan desa wisata tersebut.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana peran Pemerintah Desa dan pengelola Desa Wisata yang ada di Sriharjo dalam menyikapi peraturan PPKM Mikro yang tentu saja berdampak pada sektor wisata dan UMKM Desa Sriharjo. Di Yogyakarta sendiri sebenarnya sudah cukup banyak wisata yang dapat dikunjungi. Akan tetapi Desa Sriharjo memiliki keunikan tersendiri, satu desa dengan berbagai macam wisata yang dapat dijelajahi dan lingkungan masih asri jauh dari perkotaan. Membuat Desa wisata Sriharjo dapat menjadi destinasi wisata pilihan, bahkan untuk masuk objek wisata ditempat ini masih tergolong tidak terlalu mahal.

Walaupun penelitian pariwisata di Yogyakarta sudah cukup banyak, di Desa Sriharjo sendiri belum seperti desa wisata lainnya yang sering kali menjadi objek penelitian. Peneliti juga berusaha menganalisis kebijakan PPKM Mikro ini terhadap Desa Wisata Sriharjo, dengan ini ketika muncul peraturan ataupun kebijakan yang kurang lebih sama dapat menjadikan solusi jika menemukan sebuah permasalahan. Perlunya pengenalan wisata Desa Sriharjo agar dikenal masyarakat luas sehingga membuat sektor pariwisata dan ekonomi disana semakin membaik. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, **“Analisis Implementasi Kebijakan PPKM Mikro Terhadap Pariwisata Ditengah Covid-19 (Studi Kasus : Desa Sriharjo, Kepanewon Imogiri, Kabupaten Bantul)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu :

- 1. Bagaimana implementasi kebijakan PPKM Mikro di Desa Sriharjo?**
- 2. Bagaimana pengaruh implementasi PPKM Mikro terhadap Pariwisata di Desa Sriharjo?**

1.3. Tujuan Penelitian

Ada beberapa rumusan masalah yang nantinya dapat diketahui tujuan penelitian ini dilakukan diantaranya :

1. Mengetahui bagaimana implementasi PPKM Mikro Di Desa Sriharjo.
2. Mengetahui pengaruh dari implementasi PPKM Mikro terhadap Pariwisata di Desa Sriharjo, Kepanewon Imogiri, Kabupaten Bantul.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mencoba menyelesaikan penelitian dengan sebaik mungkin agar dapat memberikan manfaat, diantaranya :

14.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah mengembangkan pemikiran dan wawasan ilmu yang luas berada dilingkup Ilmu Pemerintahan. Khususnya terkait analisis kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah serta sektor-sektor yang berkaitan dengan pemerintahan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi bagi peneliti yang ingin

mengkaji fenomena yang serupa, selain itu dapat menjadikan sumber bacaan dan pengetahuan bagi mahasiswa, masyarakat dan elemen lainnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sebagai kajian bagaimana kebijakan tersebut direncanakan, dibuat kemudian diimplementasikan. Sehingga dapat menjadi evaluasi maupun tawaran solusi dalam pembuatan kebijakan penanganan pandemi agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu hasil penelitian ini sebagai kritik dan saran kepada pemerintah, sebagai pemegang kekuasaan agar mampu bersinergi dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dan dalam pembuatan kebijakan dilakukan dengan tepat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah, pariwisata dan UMKM di desa pada saat pandemi.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi bagi peneliti yang akan mengkaji hal yang serupa, mengingat kawasan pariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) cukup banyak. Selain itu dapat sebagai bahan bacaan dan penambah wawasan bagi seluruh lapisan masyarakat.

1.5. Tinjauan Pustaka (*Literatur Review*)

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa sumber referensi yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai tema yang dilakukan oleh peneliti. Maka peneliti akan mencoba menjabarkannya sebagai berikut:

Berdasarkan jurnal yang diteliti oleh (Muhyiddin, 2020) yang berjudul **“Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia”** . Dalam jurnal tersebut dituliskan, bahwa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia membuat pemerintah bergerak taktis. Peraturan dikeluarkan pertama kali yaitu PSBB yang berlaku diwilayah berdasarkan keparahannya. Mengingat kondisi ekonomi kian melamban dan adanya upaya pencegahan penyebaran virus. Kebijakan ini juga berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kemudian hal tersebut difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan muncul beberapa alternatif. Pertama, tetap dengan RPJMN yang sudah ada; Kedua, melakukan revisi moderat dan Ketiga, merubah dan memperbaharui dengan melihat kondisi terbaru masuknya Covid-19 dan dampak ekonomi yang sedang berlangsung.

Penelitian yang dilakukan oleh (Almuttaqi, 2020) dengan judul **“Kekacauan Respons terhadap COVID-19 di Indonesia”**. Penelitian ini menjelaskan keadaan Indonesia mengalami kekacauan dalam menangani pandemi Covid-19. Tidak segera responsif dan menganggap penyebaran Covid-19 tidak terlalu berbahaya. Selain itu alat tes terkonfirmasi positif/negatif masih rendah dan tidak sebanding dengan jumlah warga negara, ditambah alat kesehatan dan obat-obatan mengalami kelangkaan. Hal-hal ini harus segera diatasi oleh pemangku

kepentingan yang ada, guna mengantisipasi kesalahan yang berulang dan lebih siap akan keadaan hal yang kurang lebih serupa.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Suryandari, 2021) dengan judul **“Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945 Dan PP Nomor 21 Tahun 2020”**. Dalam jurnal tersebut menjelaskan pada saat Covid-19 mulai menyebar dikawasan Indonesia mulai diberlakukan peraturan *social distancing*, *physical distancing* bagi masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 untuk mencegah pandemi dan PSBB menjadi upaya paling efektif untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan keterbukaan informasi akurat pada masyarakat.

Kemudian penelitian dari (Ilyas, 2021) dengan judul **“Analisis SWOT Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Pemberlakuan Pembatasan Kebijakan Masyarakat (PPKM) Terhadap Dampak Ekonomi Di Tengah Upaya Menekan Laju Pandemi Covid-19”**. Didalam penelitian ini untuk mengetahui dampak ekonomi dengan dilaksanakannya PSBB dan PPKM untuk mencegah penyebran Covid-19. Kemudian dilakukan analisis SWOT yaitu komitmen, konsistensi, program vaksinasi, kepatuhan dan kesadaran masyarakat. Hal itu juga menjadi pertimbangan kelebihan dan kekurangan dalam kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2021) dengan judul **“Evaluasi Kebijakan PPKM Level 4 Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Kanigaran Kota Probolinggo”**. Adanya penerapan PPKM Jawa-

Bali yang didasari atas peningkatan penularan Covid-19 paska Lebaran dan varian baru Covid-19 Delta. Karena pada implementasinya wilayah Glaser Plaza dan Bundaran yang ada di Kota Probolinggo banyak pedagang kaki lima maupun took yang sepi akibat adanya penerapan Covid-19.

Kemudian jurnal yang ditulis oleh (Wahyu, A. K., Putra, Y. R. K., Utami, R. W. S., & Hertati, 2021) dengan judul **“Efektivitas Pemberlakuan Jam Operasional bagi Sektor UMKM di Kota Surabaya”**. Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/59 / KPTS / 013/2021 tentang penerapan PPKM Mikro. Didalam penerapannya terkait pemberlakuan jam operasional pusat perbelanjaan atau mall dan sektor UMKM sampai pukul 21.00 WIB. Upaya ini dilakukan pemerintah untuk menekan angka persebaran Covid-19, akan tetapi memiliki pro dan kontra dimasyarakat. Dalam pelaksanaan PPKM Mikro ini belum berjalan efektif, banyak respon dari pelaku UMKM yang keberatan akan jam operasional yang berlaku. Akibatnya pengunjung atau pelanggan yang datang kian sepi dan banyak menemukan kerugian.

Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh (Prayudi, 2020) dengan judul **“Dampak Covid -19 Terhadap Pariwisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta”**. Dijelaskan bahwa banyaknya kasus meninggak diakibatkan oleh Covid-19 yang cukup banyak menjadikan keprihatinan masyarakat dan sektor pariwisata yang kurang baik. Hasil penelitian jurnal ini membuktikan sektor pariwisata di Yogyakarta banyak mengalami kerugian sebesar 27 miliar, akibat penurunan pengunjung wisata. Kemudian adanya penerapan *“New Normal”* ini menjadi *trend* positif, yaitu sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi negara atau

masyarakat kian membaik. Ada masukan terhadap hal ini yaitu dengan cara sosialisasi dengan santun, agar masyarakat selalu menerapkan protokol Kesehatan selama mengadakan kegiatan, khususnya sektor pariwisata.

Karya jurnal yang ditulis oleh (Anggarini, 2021) dengan judul **“Upaya Pemulihan Industri Pariwisata Dalam Situasi Pandemi Covid -19”**. Penelitian ini berisikan beberapa sektor yang mengalami dampak, yaitu pariwisata. Sebanyak 11,83% pekerja Indonesia berada disektor pariwisata, hal ini menunjukkan pengaruh pandemi ini terhadap pekerjaannya. Selain itu berdasarkan data dari Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ke Indonesia pada bulan Agustus 2020 terdapat penurunan sebesar -89,225 dibanding bulan Agustus tahun 2019. Ada tiga strategi untuk memulihkan sektor pariwisata yaitu Inovasi, adaptasi dan penerapan CHSE alias *Cleanliness* (Kebersihan), *Health* (Kesehatan), *Safety* (Keamanan), dan *Environment* (Ramah lingkungan) dan Kolaborasi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Indayani & Hartono, 2020) dengan judulnya **“Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19”**. Pada jurnal tersebut dibahas terkait permasalahan pengangguran dan pertumbuhan ekonomi negara Indonesia ditengah pandemi Covid-19. Selain itu pertumbuhan ekonomi yang melamban selama pandemi sebesar 2,97%. Sedangkan jumlah pekerja yang di PHK sejumlah 212.394 pekerja, maka jumlah pengangguran kian meningkat. Jika pengangguran bertambah maka mengakibatkan defisit anggaran negara bertambah. Angka peningkatan defisit APBN tahun 2020 sebesar 6,27% berdasarkan data dari produk domestik bruto (PDB).

Pada jurnal yang diteliti oleh (Fadhil & Zaenuri, 2021) dengan judul **“Strategi Recovery Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Pada Masa New Normal”**. Pada jurnal ini dijelaskan bagaimana langkah Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam melakukan strategi pemulihan dimasa *new normal*. Keterpurukan sektor pariwisata yang ada di Yogyakarta salah satunya yaitu menurunnya kunjungan wisatawan. Kemudian upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta adalah untuk mendatangkan wisatawan dengan upaya menggandeng *stakeholder* untuk penanganan Covid-19, dana hibah pariwisata disalurkan untuk kepentingan pariwisata, dan menyelenggarakan event daring. Selain itu peneliti memberikan saran kepada Dinpar Kota Yogyakarta untuk bekerjasama dengan dinas pariwisata kota lain.

1.6. Kerangka Teori

Pada kerangka teori ini akan dijelaskan bagaimana peneliti akan menggunakan kerangka yang berkorelasi dengan judul. Kerangka teori merupakan kerangka dan acuan tentang suatu konsep, atau pada dasarnya suatu dimensi, dan sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil berpikir (H. Maulana, 2021). Akan ada beberapa kerangka teori dan akan dijelaskan sebagai berikut.

16.1. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik atau sebuah peraturan yang dimana aturan tersebut dibuat untuk ditaati dan apabila dilanggar maka mendapat konsekuensi. Adapun maksud dan tujuan kebijakan publik adalah segala bentuk tindakan pemerintah yang sudah

dirancang untuk mencapai tujuan yang harapannya oleh publik sebagai konstituen pemerintah (Sahya Anggara, 2014).

Kemudian E. Anderson dalam (Suaib, 2016)) jenis-jenis kebijakan publik yaitu antara lain:

a. Substantive and Procedural Policies.

Substantive policy yaitu sebuah kebijakan yang dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Misalnya, kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, dan lain-lain. Sedangkan *Procedural policy* adalah berupa kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (*policy stakeholders*). Misalnya Undang- Undang tentang Pendidikan, yang berwenang membuat adalah Departemen Pendidikan Nasional. Akan tetapi, dalam pembuatannya, banyak instansi/organisasi lain yang terlibat.

b. Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies.

Distributive policy yaitu suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu, kelompok, atau perusahaan. Contoh, kebijakan tentang *tax holiday*. Kemudian *Redistributive policy* adalah kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan, atau hak-hak. Contoh, kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Selanjutnya *Regulatory policy* yaitu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/pelarangan terhadap

perbuatan/tindakan. Contoh, kebijakan tentang kepemilikan senjata api.

c. *Material Policy*.

Material policy yaitu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya. Contoh, kebijakan pembuatan rumah sederhana.

d. *Public Goods and Private Goods Policies Public*.

Goods policy adalah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak. Contoh, kebijakan tentang perlindungan keamanan dan, penyediaan jalan umum. Sedangkan *Private goods policy* adalah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan oleh pihak swasta untuk kepentingan individu (perseorangan) di pasar bebas dengan imbalan biaya tertentu. Contoh tempat hiburan, hotel, dan lain-lain.

Selanjutnya suatu tahapan atau proses dalam pembuatan kebijakan publik, sebagaimana diungkapkan oleh Reply dalam (D. Maulana & Nugroho, 2019) bahwa tahap-tahap tersebut adalah:

a. *Agenda of Government*: pada tahap ini masalah yang ada di masyarakat menjadi agenda pemerintah,

b. Formulasi kebijakan dan pengesahan tujuan program (*formulation and legitimation of goals and program*): pengumpulan informasi, analisa dan penyebarluasan,

- c. Implementasi program (*program implementation*): proses pencarian dan pengerahan sumber daya untuk mewujudkan tercapainya tujuan yang ditetapkan,
- d. Evaluasi dari tindakan dan akibatnya (*evaluation of implementation performance and impacts*): menilai bagaimana implementasi kebijakan, bagaimana perwujudannya, dan apa dampak yang ditimbulkannya,
- e. Penentuan masa depan dari kebijakan (*decision absent the future of policy and program*): menentukan apakah program atau kebijakan tersebut dianjurkan dengan berbagai perbaikan atau dibatalkan.

1.6.2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan yaitu bagaimana pembuatan kebijakan yang kemudian diterapkan pada suatu tempat dengan memperhatikan kepentingan publik dan dapat diterima oleh masyarakat. Kebijakan publik merupakan pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan oleh suatu organisasi untuk mencapai sebuah tujuan (Haerul, Haedar akib, 2016). Maka dari itu jauh dalam penerapannya perlu adanya perancangan kebijakan dengan melibatkan para stakeholder agar segala aspek dapat dipenuhi guna mengurangi kecacatan kebijakan, agar nantinya pada saat kebijakan tersebut diterapkan dapat diterima masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian. Sebuah kebijakan yang diimplementasikan dengan baik maka akan terdapat perubahan yang lebih baik dan dampak yang diberikan lebih pada sisi positif.

Masmanian dan Zabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel, yaitu:

1) Variabel Independen

Mudah-tidaknya suatu masalah dapat dikendalikan yang berkenaan dengan suatu indikator masalah teori dan teknis dalam pelaksanaan, objek, keragaman dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.

2) Variabel Intervening

Diartikan sebagai suatu kemampuan dalam kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator konsistensi tujuan dan kejelasan. Sehingga dapat dipergunakan dengan teori kausal, sumber dana, ketepatan alokasi, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, prekrutan pejabat pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana yang memiliki keterbukaan kepada pihak luar, serta variabel diluar kebijakan yang dapat mempengaruhi proses implementasi sehingga berkenaan dengan indikator sosial-ekonomi dan teknologi, sikap dan risorsis, konstituen, dukungan publik, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

3) Variabel Dependen

Yaitu suatu tahap proses implementasi kebijakan publik yang menggunakan 5 (lima) tahapan, yang terdiri dari: Pertama, pemahaman tentang lembaga/badan pelaksana dalam bentuk

tersusunya kebijakan pelaksana. Kedua, hasil yang nyata,. Ketiga, penerimaan atas hasil nyata Ke-empat, kepatuhan terhadap objek. kelima, tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan suatu kebijakan yang bersifat mendasar.

Selanjutnya unsur-unsur yang mutlak harus ada dalam proses implementasi kebijakan menurut Tachjan dalam (Tajudin. AB, 2014) antara lain yaitu:

1. Unsur pelaksana (*Implementor*). Unsur pelaksana atau *Implementor* adalah berupa organisasi atau perorangan yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengawasan dalam proses implementasi.
2. Adanya program yang dilaksanakan. Terdapat program-program yang bersifat operasional yaitu program yang mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana program, serta berisi sasaran dan tujuan, alokasi sumber daya yang diperlukan, kejelasan standar, kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus dilaksanakan.
3. *Target group* atau kelompok sasaran. *Target group* atau kelompok sasaran adalah kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dalam pengimplementasian program, yang diharapkan menerima manfaatnya.

1.6.3. Konsep Pariwisata

Sebagai manusia pada sewajarnya yang memiliki rasah lelah atau jenuh pasti semua pikiran akan terasa penuh. Sering kali manusia mencari hiburan atau bahkan berlibur dimanapun guna mengurangi kejenuhan pikiran. Tak lepasnya

sektor pariwisata pada segala aspek. Maka pariwisata juga sangat penting, bahkan sektor ekonomi, budaya, politik dan lainnya saling berkaitan. Pariwisata adalah sebuah aktivitas yang kompleks, maka sudah sewajarnya memiliki keterkaitan dengan banyak aspek (Prasetya & Rani, 2014).

a. Jenis-jenis Pariwisata

Menurut Mappi dalam (Indah & Pati, 2013) Objek wisata dikelompokkan kedalam tiga jenis, yaitu :

- 1) Objek wisata alam, misalnya : laut, pantai, gunung (berapi), danau, sungai, fauna (langka), kawasan lindung, cagar alam, pemandangan alam dan lainlain.
- 2) Objek wisata budaya, misalnya : upacara kelahiran, tari-tari (tradisional), musik (tradisional), pakaian adat, perkawinan adat, upacara turun ke sawah, upacara panen, cagar budaya, bangunan bersejarah, peninggalan tradisional, festival budaya, kain tenun (tradisional), tekstil lokal, pertunjukan (tradisional), adat istiadat lokal, museum dan lain-lain.
- 3) Objek wisata buatan, misalnya : sarana dan fasilitas olahraga, permainan (layangan), hiburan (lawak atau akrobatik, sulap), ketangkasan (naik kuda), taman rekreasi, taman nasional, pusat-pusat perbelanjaan dan lain-lain.

b. Tipe Desa Wisata

Menurut (Antara & Arida, 2015) desa wisata memiliki pola, proses dan tipe pengelolaannya, di Indonesia sendiri memiliki dua tipe diantaranya:

1) Tipe daerah kantong (enclave). Tipe kantong ditandai oleh karakter sebagai berikut :

a) Lahan terbatas yang dilengkapi dengan infrastruktur yang spesifik untuk kawasan tersebut. Tipe ini mempunyai kelebihan dalam citra yang ditumbuhkannya, sehingga mampu menembus pasar internasional.

b) Lokasi pada umumnya terpisah dari masyarakat atau penduduk lokal, sehingga dampak negatif yang ditimbulkannya diharapkan terkontrol. Selain itu pencemaran sosial budaya yang ditimbulkan akan terdeteksi sejak dini.

c) Lahan tidak terlalu besar dan masih dalam tingkat kemampuan perencanaan yang integratif dan terkoordinasi, sehingga diharapkan akan tampil menjadi semacam agen untuk mendapatkan dana-dana internasional sebagai unsur utama untuk “menangkap” servis-servis dari hotel-hotel berbintang lima. Contoh dari kawasan atau perkampungan wisata jenis ini adalah kawasan Nusa Dua, Bali. Pedesaan tersebut diakui sebagai suatu pendekatan yang tidak saja berhasil secara nasional, melainkan juga pada internasional.

2) Tipe Terbuka (spontaneous). Tipe ini ditandai dengan karakter-karakter yaitu tumbuh menyatunya kawasan dengan struktur kehidupan, baik ruang maupun pola dengan masyarakat lokal. Distribusi pendapatan yang didapat dari wisatawan dapat langsung dinikmati oleh penduduk lokal, akan tetapi dampak negatifnya cepat

menjalar menjadi satu ke dalam penduduk lokal, sehingga sulit dikendalikan. Contoh dari tipe perkampungan wisata jenis ini adalah kawasan Prawirotaman, Yogyakarta.

c. Jenis Wisatawan

Menurut Oka A. Yoeti didalam buku Pengantar Ilmu Pariwisata dijelaskan ada enam jenis wisatawan berdasarkan ruang lingkup perjalanannya, yaitu:

1) Wisatawan Asing

Seorang yang bepergian keluar dari negara tempat tinggalnya dan biasanya ditandai dengan status kewarganegaraannya, dokumen perjalanan, serta mata uang yang digunakan

2) Domestic Foreign Tourist

Merupakan seorang asing yang tinggal di suatu negara yang melakukan perjalanan di negara tersebut.

3) Wisatawan Domestik

Adalah seorang wisatawan yang berwisata di dalam negerinya sendiri tanpa keluar dari batas negara.

4) Indigenous Foreign Tourist

Merupakan warga negara suatu negara yang bekerja di luar negeri yang pulang ke negara asalnya dan melakukan perjalanan wisata.

5) Wisatawan Transit

Adalah wisatawan yang sedang melakukan perjalanan wisata ke suatu negara lain dengan menggunakan kapal laut atau pesawat

udara yang mengharuskan mereka untuk berhenti sejenak di negara lain guna mengisi bahan bakar atau menambah penumpang dan akan melanjutkan Kembali perjalanannya ke tujuan semula.

6) Wisatawan Bisnis

Merupakan wisatawan yang datang untuk kepentingan bisnis dan melakukan kegiatan wisata setelah kegiatan utamanya selesai.

d. Mitigasi Bencana

Definisi mitigasi bencana menurut Joko, (2011 : 279). “Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.” Pengertian tersebut menjelaskan bahwa mitigasi bencana yaitu upaya penanggulangan bencana agar dapat mengurangi resiko bencana. Mitigasi bencana harus dilakukan secara terencana dan komprehensif melalui berbagai upaya dan pendekatan antara lain:

- 1) Pendekatan teknis yaitu secara teknis mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi dampak suatu bencana.
- 2) Pendekatan manusia yaitu pendekatan secara manusia ditujukan untuk membentuk manusia yang paham dan sadar mengenai bahaya bencana.
- 3) Pendekatan administratif yaitu pendekatan yang biasa dilakukan oleh pemerintah atau pimpinan organisasi dapat melakukan pendekatan administratif dalam manajemen bencana, khususnya di tahap mitigasi.

4) Pendekatan kultural yaitu pendekatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mengenai bencana. Melalui pendekatan ini, pencegahan bencana disesuaikan dengan kearifan masyarakat lokal yang telah membudaya sejak lama.

1.7. Definisi Konseptual

1.7.1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik yaitu sebuah peraturan yang ditujukan untuk masyarakat agar dapat ditaati dan apabila melanggarnya mendapatkan sebuah konsekuensi. Adanya kebijakan publik ini perlu dipahami bagaimana proses awal pembuatan, implementasi hingga tahapan evaluasi. Seluruh proses tersebut dirancang dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang melihat aspek baik dan buruknya sesuai kondisi yang ada, khususnya kebijakan PPKM Mikro.

1.7.2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan sebuah penerapan kebijakan publik, dimana sebuah kebijakan dirumuskan atau dibahas oleh para stakeholder. Idealnya dalam pembuatan kebijakan juga mempertimbangkan dampak baik dan buruk yang akan ditimbulkan dengan catatan minim kerugian. Hasil dari kebijakan tersebut ketika diterapkan muncul dampak positif bagi masyarakat dan tidak merugikan.

1.7.3. Konsep Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang erat kaitannya dengan ekonomi, budaya maupun yang lainnya. Maka dari itu seringkali mendengar pariwisata yang ada di pedesaan, biasa menyebutnya dengan desa wisata. Banyak potensi yang harus

dikembangkan, idealnya pemerintah membersamai masyarakat atau bahkan secara mandiri untuk membangun sarana infrastrukturnya guna menunjang wisata tersebut. Harapannya dapat menambah pemasukan masyarakat maupun pemerintah daerah dari hasil kunjungan wisatawan.

1.8. Definisi operasional

Table 1.1 Tabel Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Parameter
1	Implementasi Kebijakan	Unsur pelaksana	- Organisasi - Perorangan
		Program	- Standarisasi - Mekanisme Pelaksanaan - Sasaran Program
		Target Kelompok	- Tujuan program - Manfaat Program
2	Konsep Pariwisata (Pengelolaan Wisata)	Jenis Wisata	- Wisata Alam - Wisata Buatan
		Tipe Desa Wisata	- Desa Wisata Enclave
		Jenis-jenis Wisatawan	- Wisatawan Asing - Wisatawan Domestik

Sumber: Diolah oleh peneliti

1.9. Metode Penelitian

19.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis dapat menggunakan jenis atau metode penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri menurut Denzin & Lincoln dalam (Ridho Al-Hamdi, Sakir Suswanta, Muhammad Eko Atmojo, 2020) adalah suatu upaya melakukan penafsiran, interpretasi, dan rasionalisasi terhadap realitas kehidupan berdasarkan dengan apa yang diteliti oleh peneliti. Metode kualitatif biasa menggunakan metode wawancara, pengamatan ataupun memanfaatkan dokumen. Maka dari itu peneliti memilih metode penelitian kualitatif agar dapat meneliti lebih dalam tentang menganalisis implementasi kebijakan PPKM Mikro terhadap pariwisata dan UMKM disekitar wisata yang tentunya berada di Desa Sriharjo menggunakan cara wawancara dan dokumentasi sebagai data pendukung. Sedangkan penelitian kuantitatif menurut (Jannah, n.d.) adalah penelitian yang hasilnya berupa sajian angka ataupun presentase. Hal ini juga melihat data penunjang yang didapatkan saat melakukan penelitian nantinya.

1.9.2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan diambil oleh peneliti berada di Desa Sriharjo, Kepanewon Imogiri, Kabupaten Bantul. Pemilihan lokasi ini didasari bagaimana pengelolaan desa wisata oleh masyarakat desa secara mandiri. Sempat mendapatkan beberapa penghargaan, disatu sisi wisata di Desa Sriharjo juga tergolong belum terlalu lama. Akan tetapi sudah bisa menarik wisatawan untuk datang berlibur, Pemerintah Desa disana juga mendukung adanya wisata tersebut, terlebih adanya pandemi Covid-19 terus saja masih melanda serta kebijakan pembatasan aktivitas terus dilakukan.

1.9.3. Unit Analisa Data

Unit analisa data merupakan bagian dari isi yang akan diteliti lebih dalam yang kemudian disederhanakan. Dengan kata lain, unit analisa data ini merupakan subjek yang akan dianalisis dalam penelitian. Maka dari itu, analisis data dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Sriharjo, pengelola wisata, dan kebijakan PPKM Mikro didalam penerapannya. Karena hal ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan tersebut terhadap pariwisata serta melihat peran Pemerintah Desa Sriharjo itu sendiri.

1.9.4. Jenis Data

Pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, dapat dilihat sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer akan digunakan oleh peneliti, sebab akan terjun langsung untuk melakukan pengambilan data. Salah satunya dengan cara wawancara dengan beberapa pihak, seperti Lurah atau Carik Desa Sriharjo, Pokdarwis, Pengelola Wisata di Desa Sriharjo. Hal ini ditujukan agar dalam mendapatkan data dapat asli dan lebih rinci. Selain itu untuk mengetahui bagaimana kondisi wisata disana pada saat penerapan PPKM Mikro.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari beberapa sumber diantaranya buku, jurnal, arsip, data atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti. Data ini juga digunakan untuk memperkuat atau memperjelas data yang dirasa masih kurang.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu bagaimana peneliti mencari atau mengumpulkan data penelitian yang lebih akurat dan spesifik. Ada beberapa Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti diantaranya :

a. Wawancara

Teknik atau metode wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih detail yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Bagaimana peneliti melakukan wawancara dengan menanyakan pertanyaan yang sudah disiapkan kepada narasumber ataupun responden. Perlu diingat juga dalam melakukan wawancara perlu menyiapkan pertanyaan, pencatatan dan dokumentasi. Demi menjaga kelengkapan informasi, peneliti akan melakukan rekaman suara melalui telepon dengan izin narasumber atau responden. Kemudian peneliti akan mewawancarai Lurah atau Carik Desa Sriharjo, Pokdarwis, beberapa pengelola wisata di Desa Sriharjo. Peneliti memilih narasumber tersebut karena berkaitan dengan topik penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, serta data yang dapat menunjang penelitian tersebut. Dokumentasi yang dikumpulkan untuk digunakan peneliti berupa data dari website pemerintah, berita ataupun artikel terkait wisata di Desa Sriharjo baik sebelum pandemi atau selama pandemi. Selain itu juga data terkait bagaimana penerapan PPKM Mikro yang sudah dilakukan.

1.9.6. Teknik Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan cara mencari dan menata data secara sistematis untuk menambah pemahaman peneliti terkait topik penelitiannya serta menyajikan data sebagai temuan bagi orang lain. Analisis data adalah penyusunan, mengategorikan atau tema untuk mengetahui maknanya (Octaviani & Sutriani, 2019). Ada beberapa teknik analisis data yang dapat dilakukan, sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah analisis yang memperjelas, memilih serta menyederhanakan data mentah yang didapatkan dari lapangan. Sehingga nantinya data tersebut di reduksi guna menghasilkan informasi yang jelas dan memudahkan dalam melakukan penarikan kesimpulan.

b. Penyajian Data

Penyajian data berupa deksripsi penjabaran keseluruhan informasi yang telah terkumpul. Serta penyajian data primer dan sekunder disajikan secara naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam menyajikan data, dimana isinya dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada. Serta peneliti juga dapat menambahkan saran dan rekomendasi pada temuannya terhadap pihak-pihak terkait sesuai dengan topik penelitian, jika memang dirasa diperlukan.